

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang mengalami transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sudah dipakai Indonesia sejak hari pertama proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Pasca-Reformasi, Indonesia telah mengadopsi demokrasi parlementer, di mana pemilihan umum secara teratur diadakan untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan pejabat pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai simbol bangsa sekaligus kristalisasi nilai-nilai ideal Indonesia. Pancasila telah diakui sebagai dasar negara yang telah membantu Indonesia mengatasi berbagai tantangan. Selain itu, Pancasila diyakini dapat membuat bangsa ini menjadi maju, damai, dan adil seperti cita-cita kemerdekaan. Pancasila dapat dipahami sebagai agama publik di kalangan masyarakat Indonesia. Kekayaan yang terdapat dalam Pancasila sangat berharga dalam hal memberdayakan rakyat. Hal ini juga harus dapat membantu rakyat Indonesia untuk hidup lebih baik dan sejahtera.

Sementara itu, apatisme politik merupakan perilaku ketidakpedulian atau ketidakminatan warga negara terhadap urusan politik, yang sering muncul dalam konteks demokrasi. Sebagai sistem pemerintahan yang mengandalkan partisipasi aktif masyarakat, demokrasi memerlukan keterlibatan dan kepedulian warga terhadap isu politik. Dalam hal ini, peran lembaga sosial, termasuk gereja, dalam mendorong partisipasi politik masyarakat menjadi topik yang penting untuk diteliti. Dalam konteks ini, peran lembaga sosial, termasuk gereja, dalam mendorong partisipasi politik masyarakat menjadi subjek yang menarik untuk diteliti.

Namun, perjalanan demokrasi Indonesia tidak selalu mulus. Seiring berjalannya waktu, berbagai tantangan muncul, dan salah satunya adalah apatisme

politik. Sikap apatisisme politik dapat menghantui sistem demokrasi modern.

Walaupun demokrasi diakui secara luas sebagai sistem pemerintahan memberikan kekuasaan kepada rakyat, apatisisme politik dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Istilah "apatisisme" berasal dari kata Yunani "apatheia," yang merujuk pada keadaan tidak memiliki perasaan atau ketidakpedulian.

Dalam konteks politik, apatisisme merujuk pada ketidakpedulian, ketidakminatan, atau ketidakpartisipan dalam proses politik. Ini mencakup pemilih yang tidak terlibat dalam pemilihan umum, masyarakat yang tidak ikut serta dalam demonstrasi politik, dan individu yang menghindari perdebatan politik. Sebagai fenomena yang merajalela di banyak negara demokratis, apatisisme politik menciptakan tantangan serius bagi kesehatan demokrasi.

Dalam perkembangan demokrasi modern, partisipasi politik dianggap sebagai salah satu prasyarat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintah. Prinsip dasar demokrasi ialah bahwa warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik, dan ketika apatisisme merajalela, prinsip ini terancam. Maka dari itu sebagai fenomena yang merajalela di banyak negara demokratis, apatisisme politik menciptakan tantangan serius bagi kesehatan demokrasi dan tidak hanya muncul begitu saja tanpa ada yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya apatisisme politik dalam demokrasi :

1 Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjadi penyebab utama sikap apatis politik. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah tidak efektif dalam menjalankan fungsinya, bahwa korupsi merajalela, atau bahwa kebijakan yang diambil tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, mereka mungkin percaya bahwa partisipasi mereka dalam proses politik tidak akan membawa perubahan yang berarti. Ketidakpuasan ini dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.

2 Kurangnya pendidikan politik

Kurangnya pemahaman terhadap proses dan kebijakan politik dapat menghambat partisipasi aktif politik. Jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan politik yang cukup, maka mereka tidak akan merasa aman dalam berpartisipasi dalam politik, bahkan mungkin enggan berpartisipasi. Apatisme politik akan muncul jika masyarakat tidak memahami pengenalan politik melalui pendidikan politik sejak dini.

3 Ketimpangan ekonomi dan sosial

Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat menjadi faktor apatisisme politik. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem politik tidak adil dan mereka tidak mempunyai akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya, mereka mungkin percaya bahwa partisipasi politik tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat menurunkan semangat partisipasi politik.

4 Jarak sosial dan politik

Adanya jarak sosial antara masyarakat awam dengan elite politik juga dapat menimbulkan apatisisme politik. Masyarakat berpandangan bahwa mereka tidak memiliki cukup akses langsung terhadap pembuat kebijakan dan kebijakan yang mereka sepakati tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Indonesia meliputi tingkat pendidikan, akses informasi, dan keterlibatan dalam organisasi sosial atau keagamaan. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat harus menjadi tujuan utama untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Demokrasi lambat laun mulai memudar di era demokrasi modern ini. Gereja, sebagai institusi keagamaan, memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku politik jemaatnya. Pertanyaannya mengapa partisipasi politik penting sebagai landasan utama membangun kembali demokrasi di mana masyarakat menjadi subjek utama demokrasi? Karena partisipasi politik merupakan landasan demokrasi yang kuat dan berasal dari

ekspresi hak-hak dasar warga negara, yang merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan demokrasi.

Partisipasi politik merupakan pilar penting dalam menjaga kesehatan demokrasi dan menjamin suara masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dapat terjadi melalui berbagai organisasi sosial, dan salah satu organisasi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap masyarakat adalah Gereja. Gereja, sebagai lembaga keagamaan, tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat komunitas yang dapat mendorong partisipasi politik dan mempengaruhi tindakan warganya. Dalam artikel ini, kami akan mengungkap pentingnya peran Gereja dalam mendorong partisipasi politik, membahas bagaimana Gereja dapat memobilisasi masyarakat, dan mengapa keterlibatannya dalam politik adalah penting.pemerintahan penting untuk mengkonsolidasikan demokrasi.

Gereja, sebagai lembaga keagamaan, memainkan sejumlah peran yang dapat mempengaruhi partisipasi politik dan pemahaman politik warganya. Gereja seolah-olah menjadi penjaga moralitas dan etika dalam masyarakat. Para pemimpin gereja dapat mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai isu-isu moral dan etika yang juga penting secara politik dengan mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Gereja menghayati nilai-nilai ini dengan memberikan pelayanan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini mencakup layanan bagi masyarakat miskin, tunawisma, dan marginal. Melalui pelayanan ini, Gereja dapat menjadi agen perubahan sosial yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Biasanya media digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan sosial dan berbagai kegiatan debat politik.

Salah satu cara utama gereja dapat mempengaruhi partisipasi politik adalah melalui pemahaman agama. Gereja memiliki kemampuan untuk memobilisasi warga negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari ajaran agama. Beberapa agama memiliki doktrin sosial yang mendukung keadilan sosial dan kepedulian terhadap kelompok yang kurang beruntung. Doktrin-doktrin ini dapat memberikan landasan moral bagi

keterlibatan politik dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan.

Gereja Kristen Indonesia merupakan salah satu organisasi gereja yang memberikan pelayanan sosial melalui program nasional yang dibentuk oleh gereja sendiri dengan harapan program jangka panjang ini dapat meningkatkan kesadaran anggota Gereja dalam berpolitik dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam demonstrasi politik. Program GERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA merupakan Badan Pelayanan yang di bentuk oleh Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat.

Keterlibatan gereja dalam politik adalah penting karena ini memungkinkan penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam pembuatan kebijakan dan tindakan pemerintah. Selain itu, ini dapat menggerakkan partisipasi politik yang lebih besar di antara warga negara dan membantu menciptakan kesadaran politik yang lebih besar dalam masyarakat. Partisipasi politik yang didorong oleh gereja dapat mencakup sejumlah tindakan dan perilaku, misalkan :

- 1 Gereja dapat memotivasi warga negara untuk terlibat dalam pemilu dengan mengorganisir kampanye pendaftaran pemilih, mengingatkan pentingnya hak memilih, dan memberikan informasi tentang calon-calon yang berkompeten.
- 2 Gereja dapat menjadi tempat perdebatan dan diskusi politik dalam skala nasional. Diskusi semacam ini dapat membantu masyarakat memahami isu-isu kebijakan dan membuat keputusan yang tepat.
- 3 Gereja sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam upaya yang lebih luas untuk memerangi kesenjangan dan ketidakadilan sosial.

Namun keterlibatan Gereja dalam politik juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Ada kekhawatiran mengenai pemisahan gereja dan negara, serta risiko gereja menjadi terlalu politis. Oleh karena itu, penting untuk menemukan

keseimbangan yang tepat antara pengaruh Gereja dalam politik dan perlunya pemisahan antara masalah agama dan politik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang di atas, dalam penelitian ini akan merumuskan pertanyaan yang menjadi dasar permasalahan yang ingin diuraikan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana peran Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik jemaat melalui Gerakan Kebangsaan Indonesia, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program tersebut dalam konteks pemilihan umum di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik jemaat melalui Gerakan Kebangsaan Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Gereja melaksanakan program pendidikan politik dan metode yang digunakan untuk memobilisasi jemaat agar terlibat aktif dalam proses politik. Fokus utama adalah mengidentifikasi strategi komunikasi dan kegiatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik jemaat. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi dampak program tersebut terhadap tingkat partisipasi politik jemaat sebelum dan sesudah terlibat dalam kegiatan Gereja. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Gereja dalam meningkatkan partisipasi politik jemaat. Dengan memahami faktor penghambat tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan solusi dan rekomendasi untuk membantu Gereja mengatasi tantangan tersebut. Harapannya, inisiatif yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien. Melalui penelitian ini, Gereja diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik jemaat secara lebih signifikan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Gereja dalam mengatasi sikap apatis dalam partisipasi politik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Gerakan Kebangsaan Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membantu mengatasi sikap apatis politik. Oleh karena itu, kami berharap penelitian ini dapat memberikan informasi berharga untuk memahami peran Gereja dalam politik dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- 1 Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu penambah wawasan dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan komunikasi politik serta dapat menjadi wadah untuk mahasiswa jurusan ilmu politik universitas nasional dalam proses belajar yang meliputi pengembangan pemahaman, penalaran, dan menempa pengalaman.
- 2 Secara kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian dengan topik yang sama lebih lanjut lagi, yaitu tentang peran gereja kristen indonesia sinode wilayah jawa barat dalam meningkatkan a partisipasi politik jemaat : studi kasus gerakan politik indonesia sebagai isu utama di kalangan masyarakat (khususnya masyarakat gereja), yang dimana bisa saja menemukan perspektif baru untuk di analisa yang dapat berguna bagi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, serta Universitas Nasional.
- 3 Bagi masyarakat, secara khususnya mahasiswa dan civitas akademik melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan dalam proses belajar dan pengembangan diri.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika digunakan untuk menjelaskan tata cara penyusunan dalam penelitian ini dengan maksud mempermudah pemahaman pembaca mengenai

komponen-komponen penulisan. Adapun sistematika penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan bagian awal pembuka yang akan menguraikan mengenai: latar belakang permasalahan yang diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang selanjutnya akan dilakukan kajian menggunakan metodologi penelitian sebagai penjelasan teknik penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini memuat literatur seperti teori-teori yang berkembang serta beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran penulisan yang selanjutnya digunakan dalam melakukan analisa-analisa pembahasan. Pada bab tinjauan pustaka ini berisi tentang kajian-kajian teoritis yang menjabarkan secara luas dari penelitian terdahulu, deskriptif analisis permasalahan penelitian ini, dikaitkan dengan teoriteori yang relevan dan dianalisis untuk membantu dalam kesimpulannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Bagian dari bab ini meliputi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengelolaan dan analisis data yang akan digunakan demi mendapatkan data yang valid.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membahas gambaran umum tentang Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat, sejarah, visi dan misi, serta peran gereja dalam kehidupan sosial dan politik.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian, menggambarkan hasil observasi di lapangan untuk menunjang penelitian, dan dilanjutkan dengan analisis penulis terkait dengan penelitian yang diambil. Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik penelitian ini.

